

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses pembangunan ekonomi berdampak pada aspek sosial, politik, kelembagaan, dan ekonomi dalam masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan dicirikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang disertai dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan standar pendidikan. Meningkatkan akses terhadap kebutuhan pokok, menaikkan standar hidup melalui penambahan lapangan kerja dan peluang pendidikan, serta memperluas pilihan ekonomi dan sosial merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja merupakan indikator utama pembangunan suatu wilayah.

Salah satu masalah terbesar terkait pertumbuhan nasional Indonesia tetaplah lapangan kerja. Indonesia memiliki populasi yang besar dan terus bertambah setiap tahun, yang berarti terdapat pasokan tenaga kerja yang melimpah, terutama dari kelompok usia kerja. Dividen demografis ini menghadirkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Pasokan tenaga kerja yang besar akibat dividen demografis ini dapat berdampak pada pasar tenaga kerja Indonesia. Kelimpahan tenaga kerja ini memperketat persaingan dalam mencari pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran jika jumlah lowongan pekerjaan tidak bertambah. (Ramadhani et al., 2022).

Pasar tenaga kerja Indonesia telah menunjukkan vitalitas yang cukup besar. Jumlah penduduk diperkirakan mencapai 261,1 juta pada tahun 2016, di mana

125,4 juta di antaranya tercatat sebagai angkatan kerja. Pada tahun 2015, tercipta sekitar 2,89 juta lapangan kerja baru; pada tahun 2016, angka tersebut turun menjadi sekitar 2,45 juta; dan pada tahun 2017, angka tersebut naik menjadi sekitar 2,67 juta lapangan kerja baru.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur telah meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, terdapat 19.114.563 orang yang bekerja. Angka ini meningkat menjadi 20.449.949 pada tahun 2017. Angka tersebut meningkat menjadi 20.655.632 pada tahun 2018 dan 20.962.967 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja terus meningkat setiap tahun.

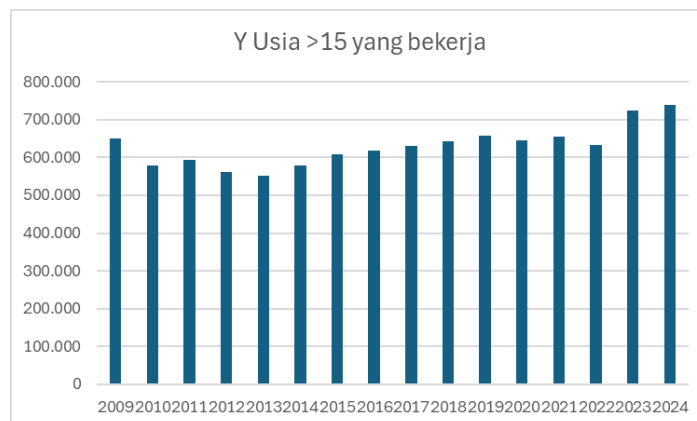
Karena kondisi pasar tenaga kerja secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penyerapan tenaga kerja; sebab, semakin banyak pekerja yang terintegrasi ke dalam angkatan kerja, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi menandakan kurangnya peluang kerja, yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan dan memperparah ketimpangan sosial.

Peningkatan jumlah tenaga kerja juga menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang tidak mudah untuk ditangani oleh pemerintah, terutama ketika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,

menyebabkan tidak seluruh tenaga kerja dapat terserap secara optimal. Akibatnya, kondisi tersebut memicu meningkatnya angka pengangguran di Masyarakat.

Kabupaten Jombang, sebagai bagian dari wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur, memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam dan mengalami perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Jombang yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa lainnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

**Gambar 1. 1 Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2024**



*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah*

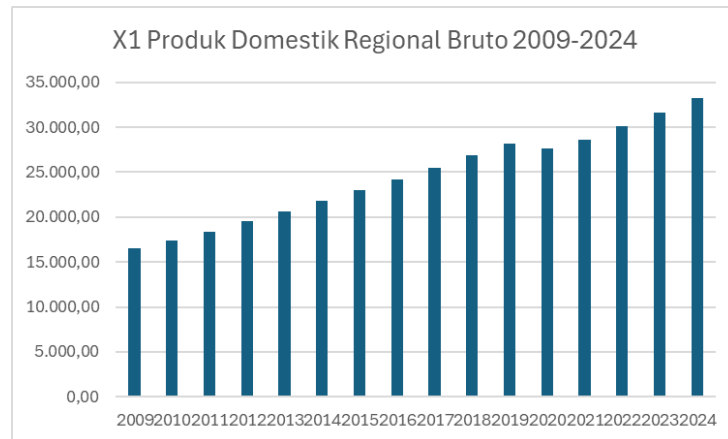
Pada gambar 1.1 terdapat jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai tahun 2024 yang terdiri dari penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja. Grafik tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukan

dinamika yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi daerah yang terus berkembang. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 607.856 Jiwa. Kemudian menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga tahun 2019, mencapai 658.832 Jiwa. Penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 645.121 Jiwa. Terjadi fluktuasi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 dan 2022 penurunan ini sejalan dengan kondisi nasional akibat pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Kondisi penyerapan tenaga kerja mulai membaik signifikan pada tahun 2023 ketika penyerapan tenaga kerja naik menjadi 723.488 Jiwa, dan Kembali naik pada tahun 2024 menjadi 738.094 Jiwa. Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan kelompok usia produktif sebagai sumber utama tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang fluktuatif mencerminkan perkembangan perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong naiknya konsumsi terhadap barang dan jasa.

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah Angkatan kerja, dan Upah Minimum. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit atau sektor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi jumlah pekerja yang dipekerjakan, dengan asumsi jika nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka jumlah nilai tambah dari produksi di semua unit meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan

tenaga kerja (Great ali, Rosalina A.M, Koloengan, 2020). Berikut ini adalah data PDRB Kabupaten Jombang tahun 2009-2024.

**Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2024**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

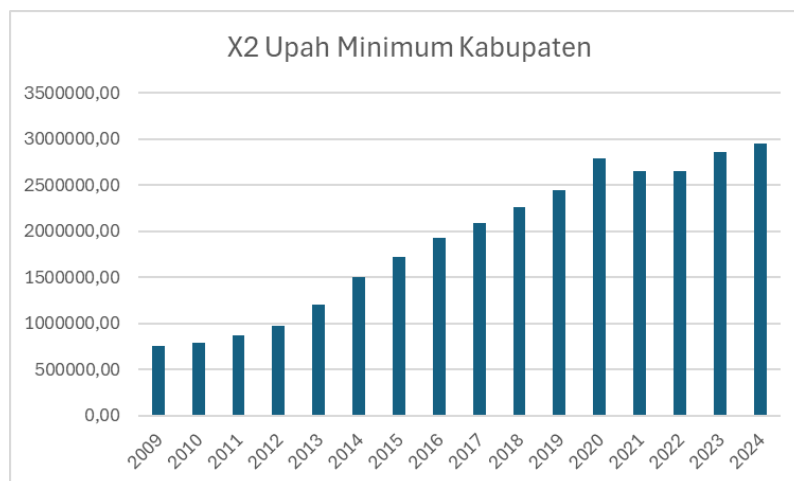
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2015, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang tercatat sebesar 21.793,19 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan menjadi 22.960,25 miliar rupiah, menandakan bahwa adanya peningkatan aktifitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 24.199,07 miliar rupiah, tren peningkatan ini berlanjut hingga akhir periode pengamatan, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang mencapai nilai 33.230,48 miliar rupiah. Secara keseluruhan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang sejak tahun 2015 mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang semakin

meningkat dari waktu ke waktu. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini yang akan menunjukkan kemajuan pembangunan dari suatu daerah (Putri et al., 2022).

Upah Minimum merupakan faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum tidak hanya berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi pekerja, tetapi juga menentukan kemampuan dan keputusan pelaku usaha dalam menyerap tenaga kerja. Upah minimum pada umumnya mengalami penyesuaian setiap tahun seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup Masyarakat.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar upah terendah yang berlaku pada Tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas serta kondisi ekonomi daerah. Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berikut adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Jombang:

**Gambar 1. 3 Upah Minimum Kabupaten Jombang Tahun 2009-2024**

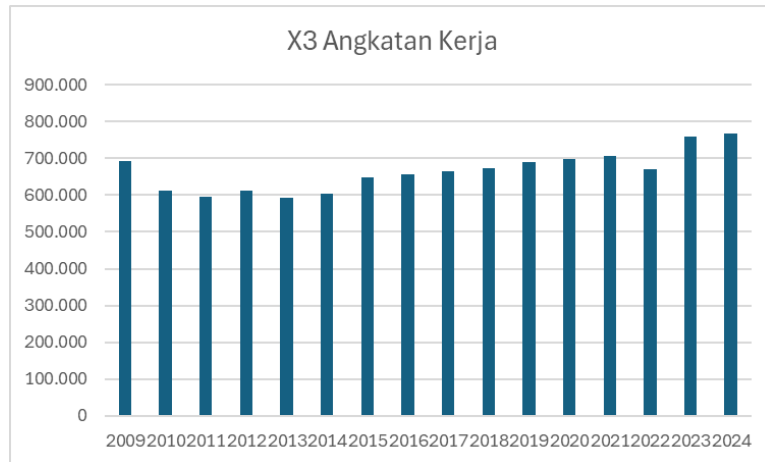


*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah*

Grafik 1.3 menampilkan Upah Minimum Kabupaten Jombang tahun 2009-2024. Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten Jombang terdapat peningkatan secara umum dari waktu ke waktu, terdapat beberapa periode yang terjadi perlambatan dan stagnasi kenaikan. Upah minimum Kabupaten Jombang menunjukkan kenaikan yang relative konsisten hingga mencapai angka diatas Rp 2.000.000, dan mencapai lebih dari Rp 2.600.000 terus meningkat hingga Rp 2.900.000 pada tahun 2024. Pada periode tertentu Dimana nilai upah minimum relative stagnan terlihat pada nilai upah minimum yang tidak mengalami perubahan dalam dua tahun berturut-turut, Kondisi ini terjadi akibat adanya pengaruh faktor eksternal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pengupahan nasional, atau tekanan terhadap usaha yang dapat membatasi kenaikan upah.

Selanjutnya terdapat faktor jumlah Angkatan kerja, Ukuran angkatan kerja merupakan faktor fundamental yang memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Angkatan kerja mencerminkan populasi usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Peningkatan ukuran angkatan kerja dari tahun ke tahun menunjukkan potensi tenaga kerja yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan demografis. peningkatan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja apabila ketersediaan lapangan pekerjaan tidak berkembang secara seimbang.

**Gambar 1. 4 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2009-2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah*

Grafik 1.4 menampilkan jumlah Angkatan kerja di kabupaten jombang tahun 2009-2024. Berdasarkan data jumlah Angkatan kerja kabupaten jombang cenderung mengalami peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2015 mencapai 647.442 jiwa, jumlah Angkatan kerja terus bertambah menjadi 655.915 jiwa dan 664.389 jiwa, yang mengindikasikan meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya pertumbuhan penduduk usia produktif serta dorongan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk masuk ke pasar kerja. Jumlah angkatan kerja kembali meningkat hingga mencapai 674.153 jiwa dan 689.118 jiwa. Jumlah Angkatan kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 758.882 jiwa dan 766.832 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Kabupaten Jombang semakin aktif, seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Peningkatan jumlah angkatan kerja juga menuntut kemampuan sektor-sektor ekonomi daerah dalam menyediakan

lapangan kerja yang memadai agar potensi tenaga kerja tersebut dapat terserap secara optimal.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan karakteristik pasar tenaga kerja daerah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berpotensi mendorong permintaan tenaga kerja. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal apabila pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, kebijakan Upah Minimum merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam menyerap tenaga kerja. Meskipun PDRB, Upah Minimum, dan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, Penyerapan tenaga kerja tidak selalu mengalami peningkatan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang?
3. Apakah Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Angkatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang, Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang, dengan fokus pada tiga variabel utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Jumlah Angkatan Kerja. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sumber resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan data time series selama

periode tertentu yang menggambarkan perekonomian dan dinamika tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan memanfaatkan pendekatan regresi linier berganda yang sesuai untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama pada tingkat regional.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif, khususnya dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi ketenagakerjaan dan peluang kerja di daerah tersebut.